KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Masyarakat Hati-Hati Sebar Informasi: Revisi UU ITE Rem Penyebaran Hoaks
Tanggal : Sabtu, 15 Juni 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Tidak hanya oposisi, pemerintah juga menginginkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), segera direvisi. Pemerintah menargetkan penguatan pasal untuk mengerem penyebaran hoaks.

Masyarakat Hati-hati Sebar Informasi

Revisi UU ITE Rem Penyebaran Hoaks

MENKO POLHUKAM Wiranto mengatakan, hampir semua negara di dunia tengah mengalami pelik menghadapi penyebaran hoaks di dunia maya. Imbas dari perkembangan teknologi.

"Problema itu terjadi karena kecepatan teknologi, terutama komunikasi di media sosial (medsos) tidak diimbangi kecepatan regulasi untuk mengatur hal itu. Jalan satu-satunya kita bisa perbaiki regulasi , Undang-Undang ITE," ungkap Wiranto di Jakarta, Kamis malam (13/6).

Dia yakin bila UU ITE diperbaiki, aturan menjadi lebih terperinci untuk menghalau hoaks, maka dengan sendirinya penyebaran informasi bohong pasti akan berkurang.

Meski demikian, Wiranto mengatakan, merevisi UU bukan hal mudah. Karena, akan memakan waktu panjang. Sebabnya, revisi UU ITE membutuhkan kajian mendalam, koordinasi antar lembaga dan rapat kerja di DPR.

Wiranto mengimbau selama revisi UU ITE belum terwujud, masyarakat lebih hati-hati menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan mudah termakan hoaks.

Pemerintah akan mengoptimalkan fungsi regulasi yang sudah ada untuk menekan penyebaran hoaks. Antara lain melakukan perlambatan akses dalam kondisi tertentu. Selain itu, melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penyebaran hoaks.

"Untuk mengerem hoaks, jangan diributkanlah jika penegak hukum melakukan tindakan tegas," cetusnya.

Upaya mendorong revisi UU ITE sebelumnya juga sering disuarakan kelompok oposisi. Bedanya, kelompok oposisi lebih menyoroti sejumlah ketentuan terindikasi menjadi pasal karet, multitafsir yang rentan disalahgunakan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pernah menyatakan



Wiranto

dukunganya terhadap usulan revisi UU ITE. Dia menilai, ada sejumlah pasal rentan digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Cawapres Sandiaga Uno juga pernah menyampaikan pandangan serupa. Dia berjanji akan mendorong revisi UU ITE jika menang pilpres.

Menurut dia, dalam UU ITE banyak terdapat pasal karet atau multi interprestasi yang bisa digunakan menjerat siapa saja.

"Kami sudah sampaikan kalau Prabowo-Sandi diberi amanah Insya Allah kami akan revisi Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan pasal karet. Kami ingin membentengi diri karena kekuasaan itu memabukkan," kata Sandi awal tahun 2019.

Hukum Keras Pelaku

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjajaran Lely Arrianie mendukung pemerintah merevisi UU ITE.

"Berita hoaks di medsos memang sudah sangat meresahkan masyarakat. Isinya tidak sedikit menciptakan rasa kebencian dan memberikan informasi menyesatkan," ungkap Lely.

Lely menilai, UU ITE harus mengatur lebih detail ketentuan untuk menjerat para penyebar hoaks. Pelaku yang sengaja menyebar hoaks harus dijerat dengan hukuman keras.

"Saya lihat mereka yang sengaja menyebar hoaks seperti tidak takut dengan jeratan hukuman, maka perlu diatur hukuman yang lebih keras," ungkapnya.

Menurut dia, hukuman keras wajar dijatuhkan kepada penyebar hoaks karena dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya mengancam kerukunan kehidupan masyarakat. Yang penting, aparat penegak hukum harus bisa membedakan antara kritikan dengan penyebaran kebencian.

"Semangat revisi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Bukan bertujuan melanggengkan kekuasaan, juga tidak mau dikritik," pungkasnya. ■ DIR